EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN TILANG ELEKTRONIK (ETLE MOBILE) DAN TILANG MANUAL SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU TAHUN 2023

Tiara Annisa, Hendri Padmi^{b2}, Mikho Ardinata³, Riri Tri Mayasari^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Menggunakan Tilang Elektronik (*ETLE Effectiveness, Manual Ticketing, Electronic Ticketing (ETLE Mobile)*) Dan Tilang Manual Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Tahun 2023, Program Studi Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Satuan Lalu Lintas mempunyai peranan penting guna memelihara ketertiban, keamanan dan penegakkan hukum terutama di jalan raya dan khususnya kepada pelanggar lalu lintas melalui tilang. Tilang diberikan sebagai sanksi administrasi kepada pelanggar lant. Upaya penegakan hukum dijalankan Anggota Satlantas Polresta Bengkulu adalah dengan memberi Tindakan berupa Tilang Manual dan Tilang Elektronik (*ETLE MOBILE*) kepada pelanggar. Dengan adanya dua metode penindakan pelanggaran ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dengan menggunakan Tilang Elektronik (*ETLE Mobile*) dan Tilang Manual di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menjadi

penghambat dalam Tilang Elektronik (*ETLE Mobile*) dan Tilang Manual di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri atas, 1 Kanit Gakkum, 1 Penyidik Gakkum, 1 Baur Tilang, 1 Banum Tilang dan 1 Anggota Turjagwali. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat indikator efektivitas yang selaras berdasarkan hasil temuan lapangan dan teori, dijelaskan bahwa pelaksanaan penindakan tilang manual dan tilang elektronik (*ETLE Mobile*) telah berjalan sesuai UU No 22 Tahun 2009, hal ini sesuai dengan faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang tersedia, akan tetapi pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan terdapat hambatan yang dirasakan. Penegak hukum memiliki hambatan dalam melakukan penindakan pelanggaran dengan tilang manual dan tilang elektronik (*ETLE Mobile*), dampaknya hambatan tersebut terjawab dengan solutif dan inovatif agar menjadikan anggota Polri yang Prediktif dan Responsibilitas dan Transparansi serta Berkeadilan dalam menjalankan layanan yang prima.

ABSTRACT

Keywords:

Effectiveness, Manual
Ticketing, and Electronic
Ticketing (ETLE Mobile).

The Traffic Unit play an important role in maintaining order, security, and law enforcement, especially on the highway, and specifically sanctions to traffic violator. The law enforcement efforts carried out by the Bengkulu City Police Traffic Unit members include issuing Manual Tickets and Electronic Tickets (ETLE MOBILE) to violators. With these two methods of violation enforcement, the author aims to determine the effectiveness of law enforcement using Electronic Tickets (ETLE Mobile) and Manual Tickets in the jurisdiction of Bengkulu City police and to identify the factors hindering Electronic Tickets (ETLE Mobile) and Manual Tickets in the jurisdiction of Bengkulu City Police. The research method used is empirical juridical research with a normative juridical approach. The informants in this study consist of five people : 1 Gakkum Unit Head, 1 Gakkum Investigator, 1 Ticketing Officer, 1 Ticketing Administrative Assistant, and 1 interviews. The findings of this study indicate that there are indicators of effectiveness that align with the result of field findings and theory, It is explained that the implementation of manual ticketing and electronic ticketing (ETLE Mobile) has been carried out accordance with Law No. 22 of 2009. This is consistent with the facts. Law enforcement officers face challenges in the societal and with manual and electronic ticketing (ETLE Mobile). These Challenges are addressed with solutions and innovations to make the police force Predictive, Responsive, Transparent, and Fair in Providing excellent service.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemilikan kendaraan bermotor dan urbanisasi telah menjadi fenomena dominan pada banyak kota besar di negara-negara berkembang. Urbanisasi diketahui menyebabkan meningkatnya populasi penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat cepat ¹.

Penggunaan transportasi di Indonesia sudah di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan suatu kesatuan yang disebut sistem yang terdiri atas angkutan jalan, lalu lintas, jaringan lalu lintas, pengemudi, kendaraan, pengelolaan, pengguna jalan, dan prasarana lalu lintas.

Pelanggaran dari lalu lintas yang seringkali terjadi di berbagai kota besar maupun berkembang. Sama halnya dengan kota Bengkulu yang merupakan kota berkembang, pelanggaran lalu lintas sering di jumpai pada kaula muda dan dewasa.

Hal tersebut dikarenakan minimnya Rambu Lalu Lintas yang ada di kota Bengkulu. Rambu Lalu Lintas menurut Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, Pasal 1 ayat (17) menjelaskan jika bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Faktor penyebab yang kedua adalah kurangnya Marka Jalan yang ada di Kota Bengkulu. Marka Jalan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, Pasal 1 ayat (18) adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu

¹ Susilo, "A Reflection of Motorization and Public Transport in Jakarta Metropolitan Area, *IATSS Research*", Vol.31 No.1 (2007) hlm 7

lintas. Faktor penyebab pelanggaran yang ketiga adalah keterbatasan titik pengawasan serta jangkauan petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas pengaturan dan penjagaan.²

Satuan Lantas (Lalu Lintas) mempunyai peranan penting guna memelihara ketertiban, keamanan dan penegakkan hukum terutama di jalan raya dan khususnya kepada pelanggar lalu lintas melalui tilang. Bukti dari pelanggaran atau biasa dikatakan dengan Tilang ialah suatu bukti pelanggaran dalam hal tertentu pada bidang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan dengan formatnya yang sudah ditentukan. Tilang diberikan sebagai sanksi administrasi kepada pelanggar lantas. Upaya penegakan hukum dijalankan Anggota Satlantas Polresta Bengkulu adalah dengan memberi Tindakan berupa Tilang Manual dan Tilang Elektronik (ETLE MOBILE) kepada pelannggar.

Tilang Manual yaitu penindakan pelanggaran yang dilakukan dengan cara mengisi belangko Tilang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) berbunyi :

“Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang”

ETLE ialah suatu sistem penindakan ketika pelanggaran terjadi yang dipasang pada kendaraan polisi dengan penggunaan handphone. Berbeda dengan ETLE Statis yang hanya di tempatkan di titik yang strategis misalkan di persimpangan jalan atau di lampu lalu lintas. Dengan kata lain, ETLE Mobile ini bersifat dinamis dan mengikuti area patroli petugas kepolisian hal ini telah tertuang pada Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Berdasarkan data prapenelitian yang dilakukan melalui Wawancara dengan Penyidik Gakkum Satlantas Polresta Bengkulu mengatakan bahwa,

² Dwi Utari Khairun Nisa (dkk.), “Implementasi Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Barelang Kota Batam”, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1 No.3, (September 2023), hlm 13

perbedaan kedua metode tilang ini memberikan stigma yang negatif terhadap metode tilang ETLE Mobile, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya tilang ETLE Mobile mempersulit proses pembebasan denda tilang. Banyak prosedur yang harus dilalui padahal aturan tersebut dibuat agar masyarakat mengalami efek jera dan lebih berhati – hati dalam berkendara.

Oleh karena untuk menilai dua metode tersebut, diperlukan alat ukur untuk menilai dan melihat bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah Hukum Satlantas Polresta Bengkulu, seperti menilai dan melihat tolak ukur dari sarana dan prasarana jalan, jumlah personil, metode dan tahapan yang efisien, serta jumlah pelanggar yang diperoleh, sehingga dapat menjadi penilian dalam melihat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polresta Bengkulu.

Dengan adanya dua metode penindakan pelanggaran ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu. oleh sebab itu peneliti hendak melaksanakan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam serta menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Menggunakan Tilang Elektronik (ETLE Mobile) Dan Tilang Manual Sesuai Dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Tahun 2023”

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian dipakai yaitu penelitian yuridis empiris, yakni semua informasi yang didapatkan atas observasi atau pengamatan, eksperimen dan juga penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.³

³ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Saksi, Bandung: Ramadja Karya.

Sumber data primernya yakni data-data yang diambil atas sumber pertama yang terdapat di lapangan dan didapatkan langsung dari objek penelitian yang asalnya dari wawancara dan juga observasi. Pada penelitian ini data primernya didapatkan peneliti dari Baur Tilang Satlantas Polresta Bengkulu. Sedangkan data sekunder (Library Research) yakni peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini misalkan seperti dari Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alat pengumpulan data yaitu terdiri dari Wawancara. Analisa data yang sifatnya kualitatif yakni suatu analisis data yang tidak didasari dengan data eksak atau berupa angka-angka namun dengan uraian naratif. Adapun Teknik analisis data dilakukan dengan Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

2.1 Efektivitas Penegakan Hukum dengan Menggunakan Tilang Elektronik (ETLE Mobile) dan Tilang Manual di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

a. Faktor Hukum Sendiri

Berdasarkan hasil empiris atau temuan dilapangan dengan ketentuan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas pada faktor hukum itu sendiri atau disini tinjauan yang digunakan UU No 22 Tahun 2009. Telah sesuai dengan kondisi dilapangan bahwa penegak hukum menjalankan penindakan pelanggaran tilang manual dan ETLE Mobile menjelaskan sesuai ketentuan yang ada. Penegak hukum menjadikan UU No 22 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam bekerja, hal ini sesuai pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas bahwa aturan ini dibuat guna menjadikan masyarakat yang tertib berlalu lintas agar menjadikan kehidupan yang tertib dan aman, sehingga menjadikan aturan ini sistematis.

Selanjutnya UU No 22 Tahun 2009 dijalankan agar mewujudkan

poin ke 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu menjadikan aturan yang telah dibuat untuk mengukur angka penerbitan lalu lintas oleh masyarakat sehingga menjadikan aturan ini sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga melalui teori efektivitas dengan faktor hukum itu sendiri dijelaskan bahwa, UU No 22 Tahun 2009 sudah efektif dijalankan dikarenakan penegak hukum bergerak dan bertugas sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan. Tilang manual dan E-TLE Mobile telah sesuai dijalankan sesuai hukum itu sendiri, Akan tetapi jika ingin melihat efektivitas secara keseluruhan bahwa tilang manual memiliki tingkat efektivitas yang komprehensif.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto jika permasalahan yang memiliki pengaruh pada efektivitas hukum tertulis dilihat atas konteks aparat akan bergantung dengan hal-hal berikut ini:

1. Sejauh mana para petugas terikat dengan berbagai peraturan yang telah ada.
2. Sejauh mana para petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang seharusnya diberikan petugas terhadap masyarakatnya.
4. Sejauh apa derajat sinkronisasi berbagai penugasan yang diberi terhadap para petugas supaya memberi berbagai batas yang tegas terkait wewenangnya.

Berdasarkan hasil empiris atau temuan lapangan dengan ketentuan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas pada faktor penegak hukum. Ditemukan bahwa penegak hukum telah menjalankan efektivitas yang diukur dari poin 1 (satu) dan poin (dua) diatas, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada informan bahwa penegak hukum menjalankan hukum sesuai dengan kesalahan masyarakat yang sebenarnya berdasarkan pelanggaran yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009, artinya penegak hukum mampu memberikan

kebijaksanaan dalam memberikan pelanggaran kepada pelanggar.

Selanjutnya, penegak hukum juga memberikan contoh teladan kepada pelanggar sebagai upaya efek jera dengan memberikan pelanggaran, hal ini sesuai dengan poin 3 (tiga) diatas. Artinya bahwa penegak hukum berupaya memberikan saksi tegas kepada masyarakat agar menjadikan UU No 22 Tahun 2009 efektivitas dijalankan dengan maksimal.

Hasil penelitian memiliki kesamaan pada ketentuan poin 4 (empat) diatas yaitu, sinkronisasi tugas dan wewenang masing masing anggota, terlihat pada hasil penelitian atau kondisi dilapangan menggambarkan bahwa anggota Turjagwali, penyidik Gakkum, Baur Tilang, Banum Tilang memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan hukum yang dijalankan, seperti anggota turjagwali yang menjalankan penindakan pelanggaran, yang kemudian Baur Tilang dan Banum memberikan sanksi berupa denda. Dan Kanit Gakkum yang melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap setiap penurunan dan peningkatan jumlah Tilang di wilayah hukum Polresta Bengkulu.

Sehingga disimpulkan bahwa melalui teori efektivitas dengan faktor penegak hukum dengan melihat hasil empiris dijelaskan bahwa penegak hukum telah sesuai menjalankan ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku baik kepada pelanggar melalui tilang manual maupun pelanggar melalui ETLE Mobile.

c. Faktor Fasilitas Atau Sarana

Berdasarkan hasil empiris atau temuan dilapangan dengan ketentuan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas pada faktor fasilitas dan sarana menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum dengan metode tilang ETLE Mobile terdapat kendala yaitu terbatasnya kamera Go Pro, akan tetapi Unit Gakkum meninjau untuk menambah jumlah kamera Go Pro agar memperlanjar

penindakan pelanggaran lalu lintas, namun dalam menjawab tantangan tersebut sementara anggota menggunakan kamera handphone, akan tetapi tidak menjadi hambatan yang serius bagi anggota yang menjalankan dikarenakan memiliki kelebihan yaitu kamera yang tidak goyang dan dapat fokus kepada gambar yang ingin di capture. Sehingga melalui hasil temuan dilapangan dengan ketentuan teori yang ada terdapat kelemahan dalam menunjang pelaksanaan tilang ETLE Mobile, akan tetapi melalui kelemahan tersebut metode ETLE Mobile memiliki banyak kelemahan pada fasilitas sarana dan prasarana, oleh karena metode tilang manual lebih efektif.

d. Faktor Masyarakatnya

Melalui hasil penelitian diatas penulis akan melakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan teori dalam penulisan ini, hasil empiris akan dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada teori Efektivitas pada indikator faktor masyarakatnya. Dalam teori efektivitas menurut Soerjono dan Soekanto terdapat berbagai elemen pengukur efektifitas yang mana bergantung dengan keadaan masyarakatnya, yakni :

1. Faktor penyebab masyarakatnya tak memenuhi aturan meskipun aturannya sudah baik.
2. Faktor masyarakat yang tak patuh dengan aturan meskipun aparat telah berwibawa dan peraturannya telah sangat baik.
3. Faktor masyarakat yang tak patuh dengan aturan meskipun aparat dan para petugas memiliki wibawa dan fasilitas yang layak.

Berdasarkan hasil empiris atau temuan dilapangan dengan ketentuan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas pada faktor masyarakat menjelaskan bahwa terdapat kesesuaian pada poin 1 (satu) diatas, meskipun aturan yang dijalankan sudah maksimal namun masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi aturan lalu

lintas sesuai UU No 22 Tahun 2009. Selain itu berdasarkan hasil empiris yang menjelaskan tentang upaya penegak hukum melakukan penindakan pelanggaran masih ditemukan masyarakat yang tidak patuh dalam berlalu lintas hal ini selaras dengan poin kedua dan poin ketiga diatas. Akan tetapi kesadaran diri masyarakat hanya memberikan dampak kepada pelanggar saja, sehingga masyarakat yang tidak merasakan penindakan pelanggaran lalu lintas tidak merasakan kesadaran diri untuk patuh dalam berlalu lintas sesuai UU No 22 Tahun 2009.

Sehingga pada teori efektivitas yang digunakan penulis memiliki kesamaan dalam menjawab hasil penelitian dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pada faktor masyarakat itu sendiri dalam melihat efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan metode tilang manual ataupun tilang elektronik belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat untuk patuh dan menciptakan kesadaran diri untuk selalu tertib berlalu lintas sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Factor Kebudayaan

Berdasarkan hasil empiris atau temuan dilapangan dengan ketentuan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas pada faktor kebudayaan memiliki kesamaan, bahwa faktor kebiasaan yang membuat masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas salah satunya kurangnya dorongan motivasi untuk tertib berlalu lintas, misalnya melihat pengendara lain aman aman saja melakukan pelanggaran sehingga melakukan peniruan, dorongan negative tersebut menjadikan alasan untuk melakukan kebiasaan yang berulang. Faktor kebudayaan sejatinya menekankan agar menciptakan kebiasaan yang baik kepada masyarakat agar tertib dan taat pada aturan lalu lintas sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehingga melalui teori efektivitas dengan faktor kebudayaan dijelaskan bahwa, teori yang digunakan penulis memiliki kesamaan terhadap hasil temuan dilapangan. Atas perbuatan pelanggaran melalui tindakan tilang manual dan tilang elektronik atau ETLE Mobile ditimbulkan melalui kesalahan pelanggaran atas tindakan kebiasaan yang berulang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menjadikan faktor kebudayaan dapat memberikan sisi untuk perubahan yang lebih baik kepada masyarakat agar merubah pola kebiasaan untuk tertib berlalu lintas sesuai dengan aturan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2 Faktor Penghambat Dalam Tilang Elektronik (*ETLE Mobile*) Dan Tilang Manual Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Dalam melaksanakan penindakan pelanggaran kepada masyarakat melalui metode tilang manual maupun tilang elektronik ETLE Mobile, informan masih memiliki kendala dan hambatan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran tersebut, penulis juga memberikan pertanyaan terkait menjawab hambatan yang dirasakan tersebut, adpaun hambatan dan menjawab tantngan tersebut dalam melakukan penindakan pada metode tilang manual yaitu:

Pertama, hambatan yang dirasakan saat melakukan penindakan pelanggaran melalui tilang manual adalah jangkauan wilayah yang jauh dari titik pos. Terdapat beberapa titik di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan daerah rawan pelanggaran lalu lintas dan rawan terjadinya kecelakaan, sehingga menjadikan daerah black spot atau daerah rawan. Untuk menjawab hambatan tersebut, penegak hukum melakukan metode tilang elektronik atau ETLE Mobile dengan berpatroli pada wilayah rawan, sehingga kedua metode ini saling menutupi kelemahan satu sama lain.

Kedua, hambatan selanjutnya yang dirasakan penegak hukum saat melakukan penindakan pelanggaran melalui tilang manual adalah, terkendala pada saat proses proses penindakan, masih masyarakat yang merasa tidak bersalah dan tidak paham akan aturan tata tertib lalu lintas,

sehingga masyarakat tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara. Untuk menjawab hambatan tersebut, pertama tama, penegak hukum melakukan peneguran dengan diawali 3S, senyum sapa salam lalu menjeleskan dengan baik dan hati hati kepada pelanggar tersebut, dan unit Kamsel akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran para pelajar.

Selanjutnya, penulis juga akan melakukan tinjauan terhadap hambatan yang dirasakan penegak hukum pada saat melakukan penindakan pelanggaran melalui metode tilang elektronik atau ETLE Mobile. Penulis juga memberikan pertanyaan terkait menjawab hambatan yang dirasakan tersebut Adapun dalam menjawab hambatan dan tantangan tersebut pada penindakan pelanggaran metode tilang elektronik atau ETLE Mobile yaitu:

Pertama, terkait fasilitas dari tilang elektronik masih memiliki kelemahan yaitu kurangnya kamera Go Pro yang tersedia, dan kualitas gambar yang dihasilkan sedikit buram sehingga sulit bagi penegak hukum untuk mendeteksi nomor polisi kendara pelanggar, selain itu penegak hukum juga memiliki hambatan terkait sinyal. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut penegak hukum menggunakan handphone agar gambar yang dihasilkan bagus, dan berpatroli dengan 1 unit motor terdiri dua anggota, sehingga 1 anggota bias fokus untuk mengendarai, dan 1 anggota bias melakukan penindakan pelanggaran.

Kedua, hambatan melalui tilang elektronik juga dirasakan oleh penegak hukum ketika pada saat entry data nomor polisi tidak sesuai atau tidak ditemukan, hal ini disebabkan pelanggar tidak menggunakan nopor polisi yang sesuai dengan surat kendaraan.

Melalui hasil penelitian diatas penulis akan melakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan teori dalam penulisan ini, hasil empiris akan dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada teori terkait hambatan dan peran penegak hukum dalam menjawab permasalahan tindakan penegakan pelanggaran melalui metode tilang manual maupun metode tilang elektronik atau ETLE Mobile.

Masalah yang muncul saat ini berhubungan juga dengan keadaan

ketidaksesuaian diantara bunyi peraturan tertulis dengan penerapan hukum yang terjadi yang sudah seharusnya ditaati oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam hal kesadaran hukum masyarakat mempunyai hubungan kuat dengan kepatuhan hukum, efektifitas dan ketaatan hukum itu sendiri yang berarti suatu kesadaran hukum dapat menunjukkan mereka berfungsi atau tidak atas hukum yang dibentuk yaitu dengan suatu pemahaman dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila kesadaran hukum sudah diberlakukan maka hidup berbangsa dan bernegara yang harmonis bisa terwujud sesuai tujuan diciptakannya hukum.

Supaya berbagai kewajiban dan berbagai larangan itu lebih efektif maka para pejabat administrasi haruslah diberikan kemampuan yang sifatnya memaksa guna penegakan larangan dan kewajiban yang dimaksud. Menurut Philips M Hadjon mengatakan jika instrument penegakan hukum administrasi mencakup pengawasan serta penegakan sanksi. Dalam hal pengawasan menjadi suatu usaha preventif guna memaksakan kepatuhan sedangkan penerapan sanksi sebagai usaha represif guna memaksakan kepatuhan.

Melalui kedua teori diatas selaras dengan hambatan yang dirasakan oleh penegak hukum terkait lemahnya kesadaran diri pelanggar atas tindakan yang mereka lakukan, maka selaras dengan teori diatas bahwa penegak hukum melakukan sikap tegas dan melakukan penegakan saksi yang sesuai dengan ketentuan UU No 22 Tahun 2009.

Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas SDM dibutuhkan pada pelaksanaan ETLE. Selanjutnya ETLE menjadi salah satu implementasi dan penjabaran atas transformasi Polri yang sifatnya Presisi yakni Prediktif dan Responsibilitas dan Transparansi serta Berkeadilan. Layanan kepolisian yang basisnya teknologi informasi komunikasi jadi suatu hal yang penting sekali guna menciptakan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi jadi instrument yang bisa memberi nilai tambah guna mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Atas teori diatas selaras dengan hasil temuan dilapangan, bahwa hambatan yang dirasakan penegak hukum melalui tilang elektronik atau

ETLE Mobile berupaya menciptakan layanan berbasis teknologi agar menjadikan pelayanan yang prima, sehingga untuk hambatan yang dirasakan penegak hukum berupaya melakukan inovasi yang solutif dalam menjalankan layanan yang berbasis teknologi agar menghasilkan optimalisasi pengembangan teknologi jadi instrument yang bisa memberi nilai tambah guna mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan tinjauan pada teori efektivitas yang digunakan memberikan kesimpulan bahwa: Faktor hukum itu sendiri memberikan gambaran sesuai dengan ketentuan teori bahwa hukum telah dijalankan selaras dengan metode dan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor penegak hukum memberikan gambaran sesuai dengan ketentuan teori bahwa penegak hukum telah melakukan penindakan sesuai dengan tupoksi masing masing dan menjalankan tugas sesuai rumusan pasal yang tertera pada ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Faktor fasilitas dan sarana prasarana memberikan gambaran bahwa masih terdapat kelemahan dalam menunjang pelaksanaan tilang *ETLE Mobile*, akan tetapi melalui kelemahan tersebut telah memiliki solusi yang membantu melancarkan penindakan pelanggaran *ETLE Mobile* sehingga disimpulkan bahwa efektivitas pada faktor fasilitas dan sarana sudah dilaksanakan dengan baik. Faktor masyarakat memberikan gambaran bahwa efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan metode tilang manual ataupun tilang elektronik belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat untuk patuh dan menciptakan kesadaran diri untuk selalu tertib berlalu lintas sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor kebudayaan dapat memberikan sisi untuk perubahan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan melanggar agar merubah pola kebiasaan untuk tertib berlalu lintas sesuai dengan aturan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hambatan dan tantangan dalam melakukan

tindakan dengan metode tilang manual dan tilang elektronik atau *ETLE Mobile*, memberikan gambaran bahwa, hambatan yang dirasakan oleh penegak hukum seperti jangkauan wilayah rawan, kesadaran diri pelanggar, dan minimnya fasilitas yang tersedia, memberikan inovasi kepada penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut dengan solutif dan inovatif agar menjadikan anggota Polri yang Prediktif dan Responsibilitas dan Transparansi serta Berkeadilan dalam menjalankan layanan yang prima.

DAFTAR PUSTAKA

Susilo, “A Reflection of Motorization and Public Transport in Jakarta Metropolitan Area, IATSS Research”, Vol.31 No.1 (2007).

Dwi Utari Khairun Nisa (dkk.), “Implementasi Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Barelang Kota Batam”, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1 No.3, (September 2023).

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Pengaturan Saksi, Bandung: Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.